

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya mengenai upaya pencegahan kerusakan lingkungan, maka didapatkan kesimpulan komunikasi lingkungan sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten khususnya DEH melakukan komunikasi lingkungan dengan berbagai kegiatan, DLH memiliki perencanaan dengan menggunakan 8 langkah komunikasi lingkungan sehingga dapat dianalisis perencanaan komunikasi lingkungan yang dilakukan, dengan mengetahui kebiasaan masyarakat, lalu mengetahui potensi dampak lingkungan, selanjutnya memberikan opsi dan arahan, sehingga menghasilkan komunikasi dari mulut ke mulut antar masyarakat (WOM), hal ini terjadi terus menerus. Kegiatan dilakukan secara langsung yaitu kegiatan yang dilakukan bertatap muka secara langsung dengan masyarakat seperti: melakukan sosialisasi, FGD, pembinaan masyarakat, pelatihan langsung, dan mengembangkan komunitas pecinta lingkungan. Tidak langsung maksudnya yaitu komunikasi yang disebarakan melalui media massa seperti: melalui SPM TV, Painan Radio dan Langkisau FM, memasang baliho, plang pelarangan karena pelanggaran zonasi hutan, surat edaran, lalu berita koran, untuk media *online* DLH *website* DLH, Facebook pribadi dan WhatsApp group.
2. Dari analisis yang sudah dilakukan maka terlihatlah kendala yang dihadapi oleh DLH, yaitu kendala eksternal adalah ketidaktahuan dan tidak pedulinya

investor/pemborong/pengusaha dan masyarakat pada hal-hal kecil seperti membuang material bangunan ke laut selain itu juga tidak tau dengan zonasi pembangunan, mempermudah pekerjaan, menghemat biaya, waktu sehingga tidak mau mengurus izin lingkungan, oknum yang tidak terima jika tanah yang dibeli tidak boleh dibangun sesuai keinginan karena harus mengikuti aturan zonasi, budaya dan kebiasaan masyarakat, miskomunikasi sesama keluarga dalam masyarakat, aturan dan sanksi dari pemerintah yang kurang tegas. Sedangkan kendala internal yang ditemukan adalah koordinasi sesama instansi seperti dari dinas pariwisata ke DLH, pegawai DLH tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan dari Sarjana Ilmu Komunikasi, dulunya kepala daerah masih kurang mempedulikan dampak lingkungan karena fokus membangun saja melihat potensi yang baru tampak sehingga tidak memikirkan yang berkelanjutan.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademis

1. Dengan adanya penelitian ini, maka untuk penelitian selanjutnya dapat diteliti adalah komunikasi lingkungan yang dipadukan dengan komunikasi pembangunan pariwisata berkelanjutan secara spesifik dapat dilakukan, hal ini didasarkan pada saat di lapangan penulis menemukan bahwa pemerintah belum memberikan sosialisasi menyeluruh mengenai bangunan jenis apa yang boleh dibangun pada kawasan pantai di Kawasan Wisata Mandeh, dimana bangunan tidak membahayakan masyarakat yang tinggal namun tetap memberikan kenyamanan dan kesan artistik untuk dijadikan tempat wisata.

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai motif kerusakan lingkungan yang melibatkan pelaku-pelaku perusakan, hal ini diperlukan mengingat pembangunan semakin pesat sehingga membuat para investor tergiur untuk menggunakan lahan sekitar pantai yang akan mengurangi kesehatan ekologi pantai dikemudian hari.

6.2.2 Saran Praktis

Komunikasi lingkungan yang dilakukan DLH dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan di kawasan wisata sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan.

1. DLH seharusnya dapat menggunakan model analisis strategi komunikasi lingkungan yang ditemukan oleh penulis sebagai langkah efektif dalam melakukan komunikasi mengenai lingkungan pada masyarakat/ investor/ pengusaha/ pemborong untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kendala dalam komunikasi.
2. Mensosialisasikan kegiatan DLH, sebaiknya melakukan kegiatan diskusi dan sharing dengan tokoh masyarakat, masyarakat dan pengusaha/pemborong/ investor setiap 2 bulan sekali atau dalam waktu berkala. Hal ini dapat menjadikan masyarakat terbuka dengan informasi baru dan tidak mudah untuk diprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
3. Kerja sama dengan media koran juga dapat dijadikan salah satu pertimbangan oleh DLH, dengan begitu dapat mengembalikan citra Kawasan Wisata Mandeh di mata masyarakat yang sudah banyak mengetahui tentang kerusakannya. Memberitakan mengenai perbaikan dan indahnya kembali

Kawasan Wisata Mandeh secara berkala, misalnya minimal terbit mingguan.

Hal ini juga dapat meningkatkan integritas pemerintah kabupaten.

4. DLH diharapkan segera mempublikasi mengenai RTRW dan zonasi yang sudah direvisi agar tidak ada pihak pemborong atau pembeli tanah yang salah mengambil tanah di kawasan hutan lindung.
5. Sangat dibutuhkan aturan dan sanksi tegas dalam upaya memperbaiki dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, namun hal ini masih belum terlihat dari pemerintah kabupaten.
6. DLH juga dapat menggandeng beberapa perusahaan seperti PT dan CV yang ada di Pesisir Selatan maupun Sumatera Barat untuk melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), hal ini juga dapat menjadi bagian dari promosi untuk perusahaan tersebut sehingga akan semakin dikenal oleh masyarakat luas.

